BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Jenis Penelitian

Penulisan suatu karya ilmiah/skripsi sudah pasti menggunakan metode penelitian karena setiap penelitian yang akan dikaji/diteliti pasti menggunakan metode untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsiten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistim, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soekanto, 2014).

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soekanto, 2014).

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum dapat dibagi dalam (Sunggono, 2013):

1. Penelitian Hukum Normatif, yang terdiri dari:
 - a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
 - b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
 - c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
 - d. Penelitian sejarah hukum; dan
 - e. Penelitian perbandingan hukum.
2. Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris, yang terdiri dari:
 - a. Penelitian terhadap identifikasi hukum;
 - b. Penelitian terhadap efektivitas hukum.

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti Penulis, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap penyalahgunaan visa kunjungan di Kota Batam (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Batam). Untuk itu metode penelitian yang akan digunakan Penulis adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat.

Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik

populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan penelitian ini berkaitan dengan penyalahgunaan visa kunjungan.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. (Sugiyono, 2014)

Jenis Data

Dalam penulisan karya ilmiah/skripsi penulis menggunakan 2 (tiga) sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2014).

1. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh

melalui observasi, data itu dikumpulkan dan sering dengan berbagai alat yang sangat canggih hingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh seperti benda ruang angkasa dapat di observasi dengan jelas.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi terus terang atau tersamar yaitu dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa Penulis sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas Penulis. Tetapi dalam suatu saat Penulis juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan secara terus terang, maka Penulis tidak akan diizinkan untuk melakukan observasi.

2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya-jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur, yaitu Penulis telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, Penulis telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh oleh Penulis dari sumber yang sudah ada, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer

seperti Undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum, laporan-laporan, dokumen, studi kepustakaan, dan lain-lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang Penulis angkat. Data sekunder terbagi atas:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, yaitu berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan kata lain bahan hukum primer diperoleh dari buku-buku berkenaan dengan landasan teori, Undang-Undang, Peraturan-Peraturan terkait penelitian dan jenis peraturan lainnya. Sesuai dengan penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer Penulis yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Dengan kata lain, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku literature yang berkaitan dengan teori yang dibahas, makalah, artikel, jurnal, internet dan, karya tulis ilmiah lainnya. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi pembahasan landasan teoritis disamping adanya sumber hukum primer. Bahan hukum sekunder yang Penulis pakai dalam penelitian ini yaitu karya ilmiah dari peneliti terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi

Penulis mengenai “Efektivitas Pelaksanaan Pasal 38 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan di Kota Batam (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Batam)”

Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga jenis alat pengumpulan data tersebut, dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Alat pengumpulan data mana yang akan dipergunakan di dalam suatu penelitian hukum, senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan (Soekanto, 2014).

a. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya-jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur, yaitu Penulis telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, Penulis telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan (Sugiyono, 2014).

b. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi, data itu dikumpulkan dan sering dengan berbagai alat yang sangat canggih hingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh seperti benda ruang angkasa dapat di observasi dengan jelas.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode observasi terus terang atau tersamar yaitu dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa Penulis sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas Penulis. Tetapi dalam suatu saat Penulis juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan secara terus terang, maka Penulis tidak akan diizinkan untuk melakukan observasi (Sugiyono, 2014).

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Batam yang beralamat di Jl. Engku Puteri No.3, Batam Center, Tlk. Tering, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, No.Tlp 0778462068, Penulis melakukan penelitian di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Batam karena sesuai dengan judul penelitian yang akan Penulis lakukan.

Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*trianglulasi*), dan dilakukan secara terus menerus tersebut mengakibatkan variasi datanya tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif), sehingga analisis data yang digunakan belum ada pola yang cukup jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam analisis (Sugiyono, 2014).

Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil jurnal penelitian terdahulu, diantaranya

1. Penelitian yang dilakukan oleh Albert Sanusi tahun 2016 di Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian”. Simpulan dari penelitian tersebut yaitu (Sanusi, 2016):
 - a. Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian dilakukan dengan dua cara yaitu tindakan administrasi di bidang Keimigrasian dan tindakan projustisia. Pada Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung lebih sering terjadi kasus keimigrasian yang penanganannya di selesaikan dengan tindakan administrasi di bidang Keimigrasian. Hal ini terjadi karena dengan penanganan administrasi kasus-kasus keimigrasian dapat terselesaikan tanpa harus diselesaikan dengan tindakan *projustisia*. Tindakan administratif keimigrasian yang sering

dilaksanakan pada kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung adalah deportasi. Tindakan *projustisia* jarang dilaksanakan, hal ini dikarenakan dirasa tidak efektif, memakan waktu yang relatif lama dalam prosesnya, dan pengalokasian anggaran yang masih belum memadai dan secara merata di semua daerah serta sumber daya manusia PPNS Keimigrasian sangat terbatas jika dibandingkan dengan penyidik Polri. Sehingga Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung lebih memilih upaya hukum Non Justisia, melalui upaya hukum administrasi ataupun deportasi ke negara asalnya.

- b. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian sering mengalami hambatan dikarenakan jumlah petugas Imigrasi yang melakukan pengawasan serta monitoring terhadap keberadaan orang asing dirasa kurang, kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi lintas sektoral, kurangnya PPNS Imigrasi yang menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris, terbatasnya jumlah sarana penunjang operasional dan masyarakat Lampung yang bersifat non kooperatif dimana laporan ataupun pengaduan dari masyarakat mengenai keberadaan atau kegiatan orang asing yang ada disekitarnya masih sangat sedikit.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang Penulis lakukan adalah di dalam penelitian ini membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengenai Keefektivitas Pasal 38 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap penyalahgunaan visa kunjungan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Suhaidi, Mahmul Siregar, Jelly Leviza tahun 2016 dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian”. Simpulan dari penelitian tersebut yaitu (Wirasto, Suhaidi, Siregar, & Leviza, 2016):
 - a. Pengawasan Warga Negara Asing di Indonesia oleh Kantor Imigrasi kelas II Belawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dilakukan dengan prinsip yang bersifat “selektif” (*selective policy*). Berdasarkan prinsip ini, orang asing yang diizinkan masuk ke Indonesia adalah orang asing yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat. maupun terhadap negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
 - b. Pelaksanaan pengawasan keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas II Belawan dilakukan yang Pertama, Pengawasan dengan Aplikasi sistem *e-Office* yakni: melakukan pemeriksaan dan penelitian melalui sistem yang mana sistem itu menjamin data para warga negara asing itu tersimpan rapi dan dapat diakses seketika dan dapat memberikan informasi awal tentang warga negara asing tersebut Kedua, Pengawasan operasional yakni melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan secara wawancara, pengamatan, penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan dan yang ketiga,

Pengawasan yang bekerjasama dengan instansi lainnya dalam melakukan pengawasan terhadap Warga Negara Asing, yang mana dilakukan kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan lainnya seperti pemerintah daerah, polisi atau aparat yang terkait lainnya. Sehingga pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II Belawan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang Penulis lakukan adalah di dalam penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengenai Keefektivitas Pasal 38 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Gindo Ginting, Faisal. A. Rani, Dahlan Ali tahun 2014 dengan judul “Pendeportasian Orang Asing yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian”. Simpulan dari penelitian tersebut yaitu (Ginting, Rani, & Ali, 2014):
 - a. Bahwa penyebab terjadinya pendeportasian orang yang melakukan tindak pidana Keimigrasian terdapatnya pemahaman tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-undang Keimigrasian dalam penegakan hukum dipandang sama dengan pelanggaran Pasal 122 Undang-Undang Keimigrasian, sehingga upaya hukum yang ditempuh lebih cenderung ke arah pendeportasian. Penyebab lain adalah rumitnya birokrasi pemberkasan perkara dengan pihak POLRI

sebagai pengawas PPNS, kemudian waktu yang cukup lama serta putusan peradilan yang pada akhirnya putusan peradilan tidak dapat menjawab rasa keadilan bagi penegak hukum karena putusannya selalu ringan dibandingkan dengan sanksi pidana yang tercantum dalam Undang- Undang Keimigrasian. Penyebab lain yaitu penjamin atau sponsor orang asing yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian bahwa penjamin orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan ke wilayah Indonesia wajib dan bertanggung jawab membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan orang asing yang dijaminnya dari wilayah Indonesia apabila orang asing dikenai tindakan administratif keimigrasian (deportasi).

- b. Bahwa dasar pertimbangan pendeportasian terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian disebabkan tidak adanya Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II Sabang. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis terdapat 1 orang PPNS Keimigrasian yang berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh yang memiliki wilayah kerja Propinsi Aceh. Kenyataannya dari pihak imigrasi Sabang tidak berkoordinasi dengan pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dengan alasan tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan penyidikan keimigrasian. Beban pekerjaan yang tumpah tindih dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga dirasakan cukup berat oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II

Sabang. Tugas pengawasan keimigrasian baik dilakukan di lapangan maupun di kantor serta pelayanan penerbitan paspor. Berbeda sebelumnya, pejabat imigrasi yang ada di Kantor Imigrasi Kelas II Sabang terisi oleh pejabat struktural, namun saat ini hanya terdiri 2 pejabat struktural sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi salah satunya yaitu penegakan hukum tidak dapat berjalan optimal. Optimalisasi penegakan hukum yang diharapkan dalam Program Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2014 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan tidak adanya anggaran dan PPNS Keimigrasian tersebut.

- c. Konsekuensi yuridis pen deportasian orang asing pelanggar tindak pidana keimigrasian terkadang tidak memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggar tindak pidana keimigrasian khususnya pelanggar Pasal 122 huruf a Undang-undang Keimigrasian. Hal lain adalah pengabaian penegakan hukum, maksudnya menerapkan hukum yang dijelaskan dalam Undang-Undang Keimigrasian hanya dilaksanakan dengan penyelesaian deportasi. Dalam Pasal 122 huruf a Undang-Undang Keimigrasian bahwa orang asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian dikenakan sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan sanksi pidana paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang Penulis lakukan adalah di dalam penelitian ini membahas tentang Pendeportasian Orang Asing yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian, sedangkan penelitian yang penulis

lakukan mengenai Keefektifitas Pasal 38 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Okky Cahyo Nugroho tahun 2017 dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing di Kantor Imigrasi kelas I Denpasar dan kelas I Khusus Bandara I Gusti Ngurah Rai”. Simpulan dari penelitian tersebut yaitu (Nugroho, 2017):

- a. Penerapan penegakan hukum terhadap orang asing di Kantor Imigrasi di kedua lokasi penelitian dengan melakukan tindakan administratif dan tindakan hukum (Projustisia), namun lebih cenderung dilakukan tindakan administratif dengan melihat kasusnya karena tindakan Projustisia merupakan pilihan akhir (*Ultimate Remidium*). Tindakan projustisia tetap mengedepankan hak orang asing tersebut seperti memberi kesempatan bagi orang asing untuk mencari pendampingan hukum. Mengenai Pengawasan Orang Asing berjalan dengan baik karena didukung oleh keberadaan Tim Pengawasan Orang Asing dalam memberikan informasi keterkaitan dengan keberadaan dari orang asing dan *leading sector* tetap berada di Imigrasi meskipun masih ditemukan kendala.
- b. Kendala yang ditemui dalam penerapan penegakan hukum terhadap orang asing yakni Peraturan Pelaksana yang khusus mengenai Penindakan dan Pengawasan Keimigrasian masih memakai aturan dari PP No. 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan dan Tindakan Keimigrasian tidak menjawab kondisi keimigrasian sekarang dengan yang semakin kompleks dan kesesuaian dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013. Kendala lainnya adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang masih terbatas, Surat Izin PPNS tidak dapat berlaku di Kantor Imigrasi lain meskipun masih di Bidang Pengawasan dan Penindakan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan termasuk dana untuk berproses peradilan yang masih kurang, dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan terlebih telah diberlakukan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang Penulis lakukan adalah di dalam penelitian ini membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing di Kantor Imigrasi kelas I Denpasar dan kelas I Khusus Bandara I Gusti Ngurah Rai, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengenai Keefektivitas Pasal 38 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Kiki Ariska Putri tahun 2016 dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda”. Simpulan dari penelitian tersebut yaitu (Putri, 2016):

- a. Pelaksanaan pengawasan keimigrasian oleh Kantor Imigrasi kelas I Samarinda dilakukan yang pertama, pengawasan administratif yakni : pengawasan melalui penelitian dokumen-dokumen warga Negara Asing yang mendukung dengan melakukan pengumpulan, penelitian dan pemeriksaan kedua, Pengawasan Lapangan yakni kegiatan rutin dan operasi

lapangan yang juga merupakan tindak lanjut pengawasan administrasi ketiga, Pengawasan yang berkerjasama dengan instansi lainnya dalam melakukan pengawasan yang mana dilakukan kerjasama dan koordinasi tentang keberadaan dan kegiatan warga Negara Asing.

- b. Sasaran pengawasan warga Negara Asing meliputi keberadaan lalu lintas warga Negara Asing dan kegiatan yang harus sesuai dengan izin yang diberikan. Hasil pengawasan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga Negara Asing. Di tahun 2015 dan 2016 sampai dengan April terdapat 16 pelanggaran dengan 14 pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal dan 2 pelanggaran *overstay*.
- c. Secara umum Kantor Imigrasi kelas I Samarinda belum menerapkan tindakan keimigrasian melalui proses pengadilan. Tindakan keimigrasian secara administratif berupa deportasi dipilih karena selama ini tidak ditemukan pelanggaran yang dikategorikan tindak pidana dan penyimpangan fatal. Masih terdapatnya pelanggaran keimigrasian kurang sadarnya kewajiban hukum dari warga Negara Asing dengan dalih tidak mengetahui informasi peraturan Undang-undang yang dikeluarkan untuk mengatur keberadaan dan kegiatan warga Negara Asing di Indonesia.
- d. Faktor Penghambat Kantor Imigrasi kelas I Samarinda dalam melaksanakan pengawasan keimigrasian warga Negara Asing adalah Faktor Jangkauan wilayah kerja, yakni jarak tempuh antara kantor di samarinda dengan wilayah operasi yang jauh dan luas kedua, Faktor sikap perusahaan TKA

yakni, kurang mengertinya perusahaan terhadap tugas dan fungsi Kantor Imigrasi kelas I Samarinda ketiga, Faktor sumber daya manusia (SDM), yakni kurang didukung oleh personil yang memadai untuk melaksanakan pengawasan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang Penulis lakukan adalah di dalam penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengenai Keefektivitas Pasal 38 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan.